

Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Pendidikan Toleransi di Era Digital

Meri Andani

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Fansuri, Aceh, Indonesia

Email Koresponden:

Mery2304muis@gmail.com

No WhatsApp (WA): 082304413845

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Pendidikan Toleransi di Era Digital. Marahnya intoleransi menjadi tantangan untuk menerapkan pendidikan pancasila dalam pendidikan toleransi. Di tengah gempuran era digital siswa dengan mudah mengakses segala sumber pengetahuan termasuk yang mengarahkan pada tindak intoleran dan kebencian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya usaha guru pancasila dan guru agama untuk menanamkan nilai toleransi, selain itu perlu juga mengawasi ekstrakurikuler agar siswa tidak terpapar paham intoleran. Di era digital yang tak kalah penting adalah memberikan rekomendasi terhadap situs, kanal, dan akun yang menyampaikan pesan-pesan toleransi.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Toleransi, Era Digital

Pendahuluan

Pada dasawarsa ini tindakan intoleran semakin meningkat, adanya pemberitaan terkait pelanggaran beribadah, mendirikan tempat ibadah, dan kecurigaan terhadap agama yang berbeda telah memperlihatkan tindakan yang intoleran (Media Indonesia 2020). Indonesia telah mengakui adanya enam agama yang terdiri dari Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama Islam adalah mayoritas penduduk Indonesia, tetapi di wilayah tertentu Islam tidak selalu mayoritas, di Bali Hindu mayoritas, di NTT Kristen mayoritas, di Papua Protestan Mayoritas, serta diberbagai daerah lainnya. Keberagamaan agama ini haruslah dikelola baik oleh negara, karena jika tidak maka akan mudahnya terpecah antar pemeluk agama.

Mahfud MD menjelaskan bahwa Indonesia patut bersyukur memiliki ideologi pancasila yang telah menyatukan berbagai perbedaan baik agama, suku, dan ras. Ia mencontohkan bahwa negara seperti India bisa terpecah karena perbedaan agama antara Hindu dan Islam, hingga muncul Pakistan. Begitu juga di Pakistan terpecah karena tidak ada persatuan, hingga muncul negara Banglades. Indonesia patut bersyukur menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, jika saja Islam menjadi ideologi, jelas saja Bali, NTT, Papua, dan daerah yang penganut Islam minoritas akan memisahkan diri dari Indonesia (Michico 2016).

Jika kita lihat sejarah Pancasila, yang tertuang di Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Ketuhan yang Maha Esa”. Hal ini karena Pancasila yang tertuang di Piagam Jakarta lebih mengutamakan Islam dibanding agama lainnya, pada waktu itu tokoh dari Papua protes terhadap Pancasila dalam Piagam Jakarta meminta hal tersebut dihapus dan Hatta pun menyetujui. Kemudian Pancasila disetujui meski menuai protes dari kalangan politik Islam yang merumuskan Pancasila, namun tokoh NU K.H. Wahid Hasyim dan tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo menerima ideologi Pancasila (Yenuri 2021).

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia telah berperan besar dalam mendukung ideologi Pancasila (Romadlan 2002). Bagi NU dan Muhammadiyah, Islam dan Pancasila tidak lah bertentangan, justru Islam dan Pancasila sejalan, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. NU dan Muhammadiyah pun telah turut serta menjaga toleransi agama. Peran NU dalam toleransi adalah sikap bersahabat dengan agama yang berbeda, bahkan setelah terjadi tindakan bom bunuh diri di gereja, BANSER yang berada di bawah naungan NU turut serta menjaga keamanan gereja (Salim 2004), begitu juga dengan tokoh NU K.H. Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai bapak pluralisme telah menanamkan sikap toleransi termasuk dalam kebijakannya saat menjadi presiden yaitu mengakui Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia (Anjani 2022). Peran Muhammadiyah pun tak kalah pentingnya, institusi pendidikan Muhammadiyah tidak hanya menerima siswa Muslim namun juga siswa non Muslim. Bahkan agama Kristen bersimpati dengan Muhammadiyah yang memunculkan istilah “Kristen Muhammadiyah” (Mut’i dan Ui Haq 2023).

Hal ini membuktikan bahwa Pancasila telah menjadi ideologi yang menanamkan nilai toleransi yang kemudian diimplementasikan oleh NU dan Muhammadiyah. Tetapi belakangan, toleransi menjadi tantangan karena munculnya paham-paham intoleran. Mencurigai terhadap yang berbeda agama, enggan berteman, bahkan mencaci maki terhadap yang berbeda. Menurut Wahid Institut tahun 2020 bahwa intoleransi meningkat dari 46 % menjadi 54 %. Hal ini tentunya perlu diwaspadai karena sikap intoleransi akan membuat keretakan antar warga negara (Media Indonesia 2020).

Kasus Ambon telah menunjukkan sikap intoleransi menggiring kepada peperangan antar pemeluk agama yaitu Islam dan Kristen. Konflik Ambon telah membuat perpecahan antar warga Ambon. Ditambah masuknya Laskar Jihad yang dipimpin Ja’far Umar Thalib ke Ambon membuat konflik semakin meruncing antar ke dua belah pihak (Hasan 2007). Pada awal tahun 2000-an terdapat kasus bom bunuh diri di gereja, menunjuka bahwa sikap intoleransi yang ditanamkan membawa seseorang bertindak ekstrem (Aisyah, Prasetyo, dan Sudjak 2020). Di beberapa daerah seperti Aceh, gereja dibakar oleh sekelompok masyarakat (Ahmad 2016) sedang di Papua terjadi pembakaran Masjid (Sabara 2023). Hal ini menunjukkan betapa bahayanya jika toleransi tidak ditanamkan di sekolah, maka dengan mudah menyulut perpecahan antar agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan *library research*, data dikumpulkan melalui buku-buku, artikel, blok, dan berita daring yang membahas Pancasila dan toleransi beragama. Kumpulan data kemudian di elaborasikan dalam melihat pendidikan Pancasila sebagai pendidikan toleransi. Tulisan ini akan dibagi tentang apa saja butir toleransi dalam Pancasila, bagaimana implementasi pendidikan Pancasila sebagai pendidikan toleransi, kenapa pendidikan Pancasila perlu menanamkan pendidikan Pancasila.

Pembahasan/hasil

Tantangan Menerapkan Pendidikan Pancasila di Era Digital

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mulai diragukan oleh paham-paham Islamisme, yang menyatakan bahwa Pancasila dianggap bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dianggap *thagut* karena dianggap menyembah selain Allah. Ajaran ini bahkan menjadi paham eksteremisme dengan menganggap Indonesia sebagai negara jahiliyah karena tidak menerapkan syariat Islam. Paham-paham ini yang kemudian menjadi gerakan jihad yang melakukan tindakan bom bunuh diri di institusi negara dan tempat ibadah agama lain (Ariyani 2016) Paham-paham ini pun menyebar di internet, yang notabene dikonsumsi anak muda. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak muda yang terpapar paham ekstremisme melakukan tindak bom bunuh diri di kepolisian, mereka memahami Islam dari internet yang dibuat oleh ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) sebuah organisasi teroris (Syamsulrijal 2021).

Keadaan ini mempertanyakan kembali kenapa muncul paham bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam? Jika ditarik dalam sejarahnya hubungan Islam dan Pancasila, bisa dimulai dari polemik Kartosowiryo dan Sukarno tentang ideologi negara. Bahwa Kartosowiryo ingin Indonesia berdasarkan basis ideologi Islam, sedangkan Sukarno menghendaki ideologi Pancasila. Kartosowiryo melakukan pemberontakan dengan Darul Islamiyah terhadap Sukarno, hingga akhirnya pemberontakan Kartosowiryo digagalkan Sukarno (Tempo 2016).

Pada masa Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi tunggal, semua partai, organisasi masyarakat, dan organisasi mahasiswa harus berdasarkan Pancasila, jika tidak dibubarkan oleh negara. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menerima aturan tersebut dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam pendirian organisasi, sedangkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terpecah menjadi dua, ada HMI yang menolak asas tunggal ideologi Pancasila dan ada yang menolak dan tetap menjadikan Islam sebagai basis ideologi. Penerapan asas tunggal ini efektif menghalangi gerakan Islam keran, namun mendukung kebebasan organisasi Islam (Chozin 2009).

Di era reformasi mulai muncul gerakan Islam transnasionalis seperti Hizbut Tahrir dan Salafi yang mulai menentang ideologi Pancasila dan menginginkan ideologi Pancasila. Pada fase ini tidak sedikit anak muda yang terpengaruh paham

Hizbut Tahrir dan Salafi. Salah satunya adalah, mereka melihat ideologi pancasila tidak membawa Indonesia menjadi lebih baik, bahwa pejabat semakin korup dan masyarakat banyak bermaksiat, Hizbut Tahrir dan Salafi kemudian menawarkan hanya Islam yang bisa menyelamatkan Indonesia dari pemimpin yang korup dan menghilangkan maksiat di masyarakat (Hasan 2018).

Situasi ini mempertanyakan ulang bagaimana peran guru Pancasila dalam menanamkan ideologi pancasila kepada siswa di sekolah. Pendidikan adalah basis dalam penanaman Ideologi, tugas guru Pancasila adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap butirnya. Namun guru Pancasila dihadapkan dengan kenyataan sebaliknya, bahwa dalam sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tetapi pada kenyataannya keadilan hanya untuk segelintir penguasa, sedangkan rakyat biasa tertindas. Pernyataan ini pun dipertegas Buya Syafii Maarif, bahwa tidak banyak materi, DPR, dan pejabat daerah yang peduli dengan pembangunan yang berkeadilan dan merata (UMY 2018).

Selain itu guru Pancasila dihadapkan dengan berita tentang pejabat yang jauh dari nilai-nilai Pancasila yaitu melakukan korupsi. Hampir setiap tahun selalu ada pejabat yang terkena korupsi mulai dari pemimpin daerah hingga dewan perwakilan rakyat dan menteri. Tidak adanya ketegasan hukum untuk pelaku korupsi, bahkan sebaliknya mereka mendapatkan keringanan hukum dan kemudahan akses ketika di penjara. Bahkan korupsi adalah suatu bentuk penghinaan terhadap Pancasila sebagaimana yang dikatakan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, LSM yang aktif menyoroiti masalah korupsi (Yuntho 2017).

Ihwal ini lah yang membuat guru Pancasila dilematis, saat nilai-nilai Pancasila yang berisi kebaikan dan keadilan disampaikan kepada siswa, tapi pada kenyataan pejabat berlaku sebaliknya. Di tambah mata pelajaran Pancasila hanya sebagai normatif, tidak sungguh-sungguh ditanamkan. Apa yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan perilaku pejabat yang harusnya menjadi panutan bagi anak muda. Pada sisi lain, islamisme menawarkan solusi yang seolah-olah benar dengan mendirikan negara Islam dan menerapkan syariat Islam (Hasan 2018).

Urgensi Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Toleransi

Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, hal ini menegaskan betapa pentingnya persatuan. Indonesia yang memiliki ragam, suku, ras, agama, dan kepercayaan sangat rentan jika tidak ada persatuan. Pada sejarah Indonesia awal kita telah melihat pemberontakan terhadap Indonesia, mulai dari Darul Islamiyah mendasari pada ideologi Islam yang dipimpin oleh Kartosowiryo di Bandung, Daud Bereuh di Aceh, dan Kahar Muzakar di Makassar (Solahudin 2011). Lalu pemberontakan daerah di Sumatra Barat dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) dan pemberontakan di Indonesia Timur dengan Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Sejarah ini menunjukkan betapa rentannya Indonesia terpecah jika tidak ada kesatuan (Aryasahab 2023).

Pada masa Reformasi saat hingar bingar demokrasi, muncul gerakan Islam yang mengarah pada paham Intoleran, Front Pembela Islam (FPI) yang ingin mengembalikan Pancasila sebagaimana dalam piagam Jakarta (Anwar 2014), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menentang negara Pancasila dan mendorong untuk berdirinya Khilafah Islamiyah atau negara Islam (Hilmy 2011), kemudian paham ekstrem dari Abu Bakar Baasyir yang menjadi ideolog jihadis, mengartikan pancasila sebagai *thaghut* yang berarti menyimpang dari ajaran Islam. Paham yang dibawah Abu Bakar Baasyir ini kemudian memunculkan terorisme hingga terjadi tindakan bom bunuh diri di gereja. Pada tataran wacana, ruang publik yang semakin terislamisasi mengajak masyarakat Muslim untuk jadi saleh, mengabaikan sisi toleransi. Dampaknya terjadi intoleransi.

Pendidikan Pancasila yang diajarkan di sekolah, tampaknya masih berjalan normatif tanpa menanamkan secara serius nilai-nilai pancasila yang di antaranya adalah toleransi terhadap sesama. Penelitian Mun'im Sirry tentang toleransi di sekolah menunjukkan bahwa sikap toleransi terjadi apabila ada pertemuan terhadap orang yang berbeda. Terutama berbeda agama. Jika siswa hanya berteman dengan sesama Muslim saja tanpa pernah berteman dengan non-Muslim maka rentan bersikap intoleran dan berprasangka buruk (Sirry 2023).

Pemahaman toleransi didapati siswa tidak hanya dari sekolah namun juga internet. Situs-situs yang cenderung mengarah pada paham intoleran lebih dominan dan mudah diakses, hingga paham tersebut yang muncul dalam pandangan siswa terkait toleransi. Mereka membatasi pertemanan kepada yang berbeda agama, bahkan mencurigai orang yang berbeda agama (Saputra 2018).

Situasi ini menggambarkan betapa penting dan gentingnya pendidikan Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, bahwa guru Pancasila harusnya tidak hanya menjelaskan di ruang kelas, namun mengimplementasikan nilai toleransi dengan mempertemukan siswa dengan orang-orang yang memiliki agama berbeda, hingga mereka memahami bahwa ada perbedaan, namun tetap bisa saling hidup berdampingan. Selain itu juga, pandangan Islam yang toleran lebih ditonjolkan, tentang bagaimana sikap Nabi terhadap pemeluk agama yang berbeda.

Implementasi Pendidikan Toleransi di Sekolah

Nilai-nilai pancasila dalam pendidikan toleransi haruslah ditanamkan di sekolah dan kampus. Pada implementasi toleransi di sekolah adalah tidak adanya sikap diskriminasi antar siswa yang berbeda agama, guru bersikap adil terhadap siswa yang berbeda agama, dan guru-guru yang berbeda agama bisa saling berkomunikasi tanpa prasangka. Kegiatan Hari Besar setiap agama menjadi pupuk semangat untuk bersikap toleransi, mengajak siswa untuk berkomunikasi dengan yang berbeda agama bisa mendorong toleransi. Siswa diajarkan bahwa perbedaan adalah fitrah manusia, bahwa setiap manusia memiliki pemahaman agama yang berbeda, memiliki suku yang berbeda, dan memiliki ras yang berbeda (Alzana dan Harmawati 2021).

Sekolah sendiri memiliki keberagaman guru dan murid yang memiliki latar agama berbeda jika dibanding dengan pesantren dan madrasah. Rasa cinta, kasih sayang, dan menghargai sesama haruslah ditanamkan pada siswa bahwa tidak ada orang yang sama dengan dirinya, ada orang-orang yang memiliki kepercayaan berbeda. Maka haruslah ditanamkan untuk memberikan kesempatan terhadap yang berbeda untuk beribadah, menjalankan segala ajaran agama yang telah dianut, serta merayakan hari besar agama.

Kebijakan implementasi pendidikan toleransi dapat dilaksanakan dengan: 1) pendidikan toleransi tidak hanya diberdayakan pada pendidikan sekolah namun perlunya kerjasama lingkungan masyarakat, bahwa sikap toleransi adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keurukunan antara warga. 2) Memberikan pemahaman untuk tidak menghina orang berdasarkan agama, etnik, dan ras. Justru perbedaan diajarkan untuk bisa berdampingan bersama. 3) menjalin kerjasama kelompok sehingga peserta bisa saling mengenal satu sama lain (Alzana dan Harmawati 2021).

Guru Pancasila memiliki peran dalam menghubungkan Pancasila dan sikap toleransi. Pendidikan Pancasila adalah wujud bentuk dukungan negara terhadap kerukunan warga untuk bisa saling bersama dalam perbedaan. Guru dalam kelas memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk bertanya dan berinteraksi, lalu menanamkan sikap berteman terhadap yang berbeda termasuk beda agama, beda ras, dan beda suku. Guru mengajak untuk berkerja kelompok untuk menyelesaikan suatu tugas (Hadisaputra 2020).

Selain guru Pancasila, guru agama punya peran penting untuk menanamkan sikap toleransi. Guru agama Islam bisa mengajarkan *tasamuh* yaitu sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Kegiatan yang berisi sosial yang melibatkan agama yang berbeda bisa mendorong siswa untuk saling berkomunikasi, memberikan penekanan terhadap *rahmatan lil alamin* yakni Islam sebagai rahmat bagi semesta, menekankan pada akhlak mulia seorang Muslim, mencontohkan bagaimana Rasulullah bertoleransi dengan agama yang berbeda, saat pembagian kelompok siswa dipersilahkan untuk bertanya dan menghargai pendapat yang berbeda. Materi pendidikan Islam mengaitkan dengan materi berupa ayat Al-Quran yang menekankan akhlak terhadap non Muslim. Ayat-ayat yang berbunyi soal kedamaian, keadilan, kebaikan, dan nilai-nilai universal. Memasukan materi fikih kebangsaan, menceritakan bagaimana Nabi memimpin Madinah yang termasuk di dalamnya ada non Muslim (Hadisaputra 2020).

Sekolah pun hendaknya tidak hanya menyediakan guru agama Islam, namun guru agama lain sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga siswa yang beragama Kristen bisa belajar dengan guru Kristen, siswa Protestan bisa belajar dengan guru Protestan, siswa Hindu bisa belajar dengan guru Hindu, dan begitu seterusnya. Hendaknya setiap guru agama menekankan pentingnya sikap toleransi, bahwa dalam ajaran agama diajarkan untuk bersikap baik terhadap yang berbeda dan saling menghargai. Keberadaan guru agama yang bisa saling

berkomunikasi, akan menjadi contoh siswa untuk tidak enggan berteman dengan orang yang berbeda agama (Romario 2017).

Pihak sekolah harus turut memperhatikan ekstrakurikuler agama seperti Rohis, agar tidak mudah disusupi paham Islam yang intoleran, paham yang merasa paling benar, lalu mudah menyalah-nyalahkan orang yang berbeda. Perhatian ini bisa dilakukan dengan pengawasan terhadap alumni sekolah yang mengajar. Jika diketahui paham yang disampaikan berusaha menentang ideologi pancasila serta membenturkan Islam dan Pancasila, maka guru bisa melakukan keputusan secara sepihak dengan alumni untuk tidak lagi mengisi kegiatan ekstrakurikuler Rohis (Thohiri 2019).

Merokemendasikan Situs, Kanal, dan Akun yang menyampaikan pesan toleransi

Siswa saat ini adalah pengakses internet terbesar, sebagian besar pengetahuan mereka dapatakan dari internet termasuk tentang Islam. Jika tidak hati-hati, siswa mudah terjerumus kepada paham intoleran. Dalam hal ini lah pentingnya peran seorang guru dalam memberikan rekomendasi apa saja situs, kanal, dan akun yang mengarahkan pada toleransi beragama. Sehingga bisa memupuk sikap siswa untuk bertoleransi.

Adapun situs-situs yang mengarahkan pada paham dan nilai toleransi di antaranya terdapat pada *Islami.co*, *NU Online*, dan *Ib. Time*, situs-situs tersebut dikelola oleh anak muda NU dan anak muda Muhammadiyah, mereka mengambil berbagai referensi baik dari ayat, hadis, dan kitab yang menyampaikan tentang toleransi. Tidak hanya nilai toleransi, namun bagaimana menjadi Islam yang moderat. Dengan menyarankan situs-situs ini, siswa diajak untuk memahami bahwa beragama bukan berarti merasa paling benar lalu menyalah-nyalahkan orang lain, justru dengan beragama diajak untuk menjadi rahmat bagi semesta.

Islami.co yang didirikan oleh Savic Ali pada tahun 2013 mengutarakan terbentuknya situs *Islami.co* bertujuan menumbuhkan masyarakat yang toleransi dan penuh perdamaian, *baldatun toyyibatun* yang diberkahi Allah dan menjadi impian seluruh umat manusia. *Islami.co* merespon situs-situs keagamaan yang akhir-akhir ini berisi provokasi dan kebencian (Nurman 2019). Situs *NU Online* adalah kepanjangan dari organisasi NU, secara keorganisasian NU sudah menjalankan toleransi beragama dan menjadi contoh. Kehadiran *NU Online* adalah perpanjangan gagasan NU yang toleran di internet (Ciptadi 2024). Begitu juga dengan *Ib. Time* situs dari Muhammadiyah yang dikelola anak muda Muhammadiyah, sama seperti NU, dalam hal toleransi Muhammadiyah sudah menjalankannya dalam tataran organisasi gerakan. *Ib. Time* mempromosikan teologi kerukunan agar terbentuk sikap toleransi (Shofiyullah 2021).

Mengenai Kanal Youtube, guru bisa merekomendasikan dan mungkin nonton bersama video Habib Husein Ja'far dalam *Log In* dan *Berbeda tapi Bersama*.

Habib Husein menjadi contoh bagaimana pemuka agama Islam bersikap toleransi, pertemuan Habib Husien dengan tokoh agama lain seperti Pendeta dari Protestan, Pastor dari Kristen, Bikhu dari Budha, Pandita dari Hindu, Xue Shi dari Konghucu. Habib Husein bisa berdialog santai dan mencari titik nilai universal di setiap agama, bahwa setiap agama mengajarkan pada sikap keadilan, kebaikan, dan perdamaian.

Youtube selama ini telah lama menjadi akses bagi siswa mendapat pengetahuan Islam, berlimpahnya ceramah dari ustaz yang berbagai ragam latar, konten, dan materi dakwah menjadi konsumsi siswa. Maka penting kiranya guru mengarahkan kepada pendakwah seperti Habib Husein yang menyebarkan pesan dakwah yang berisi toleransi beragama. Selain itu pula Habib Husien memiliki latar belakang Islam yang mendalam, ia berasal dari keturunan Nabi yang mendapatkan gelar Habib, lalu belajar Islam dari orang tua, serta menempuh pendidikan Islam secara mendalam.

Kemudian akun yang bisa direkomendasikan guru adalah *NU Garis Lucu*, *Muhammadiyah Garis Lucu*, *Kristen Garis Lucu*, *Hindu Garis Lucu*, dan akun-akun yang mengatasnamakan garis lucu, memperlihatkan bagaimana dialog antar orang-orang yang berbeda baik berbeda ormas maupun berbeda agama bisa berjalan harmonis dan penuh canda. Agama dalam utasan akun-akun garis lucu menjadi inklusif sehingga tidak terkesan kaku. Dipelopori oleh *NU Garis Lucu*, yang pada awalnya merespon *NU Garis Lurus* yang coba menolak NU yang dianggap Liberal dan Sekuler, dengan kehadiran *NU Garis Lucu* menggunakan Gus Dur sebagai ikon mampu menjadi NU tampil lebih inklusif dengan gaya humor serupa Gus Dur (Hoesterey 2021).

Pemberian rekomendasi terhadap situs, kanal, dan akun yang menyampaikan pesan-pesan toleransi beragama. Mendorong siswa untuk menanamkan nilai toleransi beragama di sekolah, menjauhi sikap deskriminasi terhadap yang berbeda, tidak mencaci maki terhadap yang berbeda, serta terjalinnya kerukunan antar siswa.

Kesimpulan

Implementasi Pendidikan Pancasila dalam pendidikan toleransi didasarkan pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia serta semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kerukunan di antara masyarakat haruslah dijaga demi menjunjung persatuan. Sekolah adalah intitusi penting dalam menanamkan kerukunan dan memberikan nilai toleransi. Peran guru Pancasila sentral untuk meberikan pemahaman toleransi, bahwa setiap orang berbeda-beda. Selain guru pancasila, guru agama pun memiliki peran signifikan memberikan materi yang mengarahkan pada nilai universal, ayat tentang toleransi, sikap toleransi Nabi. Kerukunan antar guru agama yang berbeda pun menjadi contoh bagi siswa.

Di era digital hal yang paling penting adalah memberikan rekomendasi terhadap situs, kanal, dan akun yang menyampaikan pesan toleransi. Situs Islami.co, NU Online, dan Ib. Time bisa menjadi pilihan siswa untuk mencari

pengetahuan agama. Begitu juga dengan Youtube dari Habib Husein soal podcastnya dengan tokoh agama lain, memberikan gambaran sikap toleransi. Akun yang bisa direkomendasikan guru adalah NU Garis Lucu, Muhammadiyah Garis Lucu, Kristen Garis Lucu, Hindu Garis Lucu, yang menggambarkan sikap toleransi dengan humor.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali. 2016. "Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya Dominan." *Harmoni* 15 (3):45–59.
- Aisyah, Udji, Ratna Azis Prasetyo, dan Sudjak. 2020. "Jihad perempuan dan terorisme." *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* 14 (1):125–40.
- Alzana, Anissa Wika, dan Yuni Harmawati. 2021. "Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural." *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 9 (1):51–57.
- Anjani, Rian. 2022. "Menganalisis Peran Gus Dur dalam Perjuangan Hak Umat Beragama Khonghucu di Indonesia." *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1 (1):85–93.
- Anwar, Saeful. 2014. "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma 'rûf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 220–50.
- Ariyani, Sri Dewi. 2016. "How does Pancasila work in countering radicalism and terrorism in Indonesia?" *Jurnal Scientia Indonesia* 2 (2):119–40.
- Aryasahab, Dhoni Frizky. 2023. "Sejarah PRRI/Permesta: Awal mula munculnya otonomi daerah secara menyeluruh di Indonesia." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 8 (1):37–44.
- Chozin, Muhammad Ali. 2009. "Peran Asas Tunggal Pancasila dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras." *Jurnal Islam Indonesia* 1 (1):9–25.
- Ciptadi, Suluh Gembyeng. 2024. "The Social Construction of Tolerance Discourse through Online Media: Study of NU Online." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 18 (1):113–23.
- Hadisaputra, Prosmala. 2020. "Tolerance Education In Indonesia: A Literature Review." *Dialog* 43 (1):75–88.
- Hasan, Noorhaidi. 2007. *Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. New York: Southeat Asia Program Publication.
- Hasan, Noorhaidi. 2018. "Pendahuluan: Menuju Islamisme Populer" *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*. disunting oleh N. Hasan. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.

Hilmy, Masdar. 2011. "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (Hti)." *Islamica* 6 (1):1-13.

Hoesterey, James B. 2021. "Nahdlatul Ulama's 'Funny Brigade': Piety, Satire, and Indonesian Online Divides." *Cyberorient* 15 (1):85-118.

Media Indonesia. 2020. "Survei Wahid Institute: Intoleransi-Radikalisme Cenderung Naik." Diambil 6 Juni 2024 (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/284269/survei-wahid-institute-intoleransi-radikalisme-cenderung-naik>).

Michico, Nathania Riris. 2016. "Mahfud MD: Indonesia Bersatu dan Rukun Karena Pancasila." *Detiknews*. Diambil 6 Juni 2024 (<https://news.detik.com/berita/d-3223337/mahfud-md-indonesia-bersatu-dan-rukun-karena-pancasila>).

Mut'i, Abdul Mu'ti, dan Fajar Riza Ui Haq. 2023. *Kristen Muhammadiyah; Mengelola Pluralitas Agama*. Jakarta: Kompas.

Nurman, Silmi Novita. 2019. "Penguatan Islam Moderat Di Era Post Truth: Telaah atas Situs Online Islami.co." *Jurnal Al-Aqidah* 11 (2):179-88.

Romadlan, Said. 2002. "Diskursus Gerakan Radikalisme dalam Organisasi Islam (Studi Hermeneutika pada Organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Dasar Negara, Jihad, dan Toleransi)." Universitas Indonesia, Jakarta.

Romario. 2017. "Penanaman Nilai-nilai Toleransi Beragama Di SMP Negeri 2 Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah." UIN Antasari, Banjarmasin.

Sabara. 2023. "Peran Nu Sebagai Agen Perdamaian Di Papua." *Mimikri* 9 (1):89-106.

Salim, Hairus. 2004. *Kelompok Paramiliter NU*. Yogyakarta: Lkis.

Saputra, Ranga Eka. 2018. *Api dalam sekam: keberagamaan generasi Z: survei nasional: sikap dan perilaku keberagamaan di sekolah dan universitas*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shofiyullah, Ahmad. 2021. "Analisis Wacana Kritis Konsep Teologi Kerukunan dalam Website IBTimes." UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Sirry, Mun'im. 2023. *Pendidikan dan Radikalisme: Data dan Teori Memahami Intoleransi Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: Suka Press.

Solahudin. 2011. *NII SAMPAI JI: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

Syamsulrijal. 2021. "Guruku Orang-Orang dari Gawai: Wajah Islam Gen Z yang Belajar Agama Melalui Media Online." *Mimikri* 7 (1):1-19.

Tempo. 2016. *Kartosoewirjo*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Thohiri, M. Kholid. 2019. "Radikalisme Islam dan Moderatisme Islam di Sekolah Menengah (Kontestasi Ideologi, Aktor Dan Jejaring Sosial)." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 3 (1):598–607.

UMY. 2018. "Sila Kelima Pancasila Masih Menjadi Dilema." Diambil 6 Juni 2024 (<https://www.umi.ac.id/sila-kelima-pancasila-masih-menjadi-dilema>).

Yenuri, Ali Ahmad. 2021. "Penghapusan Tujuh Kalimat Dalam Piagam Jakarta Dalam Teori Sadd Dzari'ah." *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2):154–70.

Yuntho, Emerson. 2017. "Korupsi Itu Penghinaan Terhadap Pancasila." *Inconesian Corruption Watch*. Diambil 6 Juni 2024 (<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-itu-penghinaan-terhadap-pancasila>).